



# Peluk Erat Orang Tua Korban Daycare

## ■ Pemerintah Hadir untuk Bantu Sembuhkan Trauma

**Kita berikan dukungan supaya orang tuanya kuat dulu, sehingga nanti bisa maksimal mendampingi anaknya.**

**YOGYA, TRIBUN** - Wajah murung masih menyelimuti para orang tua yang anaknya menjadi korban Daycare Little Aresha Yogyakarta. Mereka menyesal dan merasa berdos, karena telah memasukkan anaknya ke lembaga penitipan yang ternyata berubah menjadi tempat penyiksaan.

Hal itu terlihat saat para orang tua dari anak-anak korban Daycare Little Aresha melakukan audiensi persiapan pendampingan hukum dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, di Godean, Sleman, Rabu (29/4).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah orang tua korban meluapkan emosi karena buah hatinya diperlakukan tidak manusiawi oleh lembaga yang janji di awal tampak manis sekali. Para orang tua juga mengeluhkan anaknya yang sekarang mengalami trauma dan sakit.

Kini, mereka bukan hanya mendesak proses pidana terhadap para terduga pelaku penganiayaan, tetapi juga memperjuangkan restitusi sebagai kompensasi atas biaya medis dan trauma psikis yang tak ternilai harganya.

Satu di antara orang tua korban, Sukirman menyampaikan, langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata dari pihak pengelola. Mengingat, biaya yang dikeluarkan para orang tua untuk menitipkan anak di daycare tersebut tidaklah sedikit.

• ke halaman 11



### KUATKAN MENTAL DEMI KESEMBUHAN BUAH HATI

- Para orang tua yang anaknya menjadi korban Daycare Little Aresha Yogyakarta masih diliputi rasa trauma.
- Mereka menyesal dan merasa berdos, karena telah memasukkan anaknya ke daycare yang tak bertanggungjawab.
- Pemkot Yogyakarta melalui UPT PPA pun memberikan pendampingan psikologis awal kepada para orang tua.
- Hal ini dilakukan agar para orang tua memiliki kekuatan mental mengawal proses pemulihan anak-anak mereka.
- Pihak Pemkot juga mulai mengalihkan anak-anak korban daycare ke sejumlah tempat penitipan lain yang memenuhi standar.
- Pengalihan dilakukan untuk memastikan anak-anak tetap mendapat pengawasan yang layak, aman, dan terpantau.

GRAPIS/M.FAUZARAKHIMAN

**Pelek Erat**

Sambungan Hal 1

Akan tetapi, fasilitas yang didapatkan justru jauh dari yang dijanjikan, bahkan diduga telah berubah terjadi tempat penyiksaan. "Jadi tuntutan kami selama ramban pidana tetap berjalan, tuntutan restitusi juga kami minta," katanya, Rabu (29/4).

Sukirman mengungkapkan, para orang tua mengeluarkan biaya rata-rata antara Rp1,1 juta hingga Rp1,8 juta perbulan, tergantung paket yang diambil. Penakanan terhadap restitusi ini, juga didasari atas biaya medis yang harus ditanggung orang tua karena kondisi anak sakit.

Wangs Jets, yang berdomisili di Umbulharjo ini membenarkan bahwa anaknya yang baru berusia satu tahun lebih harus menjalani tiga kali rawat inap atau opname di RS 'Hidayatullah hingga diujuk ke RS Panti Rapph akibat kondisi fisik drop.

Para orang tua juga memasukkan unsur kerugian psikis dalam poin restitusi yang rencananya hendak dituangkan dalam berita acara tuntutan. Sebab dampak dari peristiwa ini membuat banyak orang tua mengalami trauma mendalam dan gangguan produktivitas.

Istri Sukirman, yang merupakan seorang ASN di Kota Yogyakarta, bahkan harus mengambil cuti demi mendampingi pemulihan mental sang buah hati. "Kalau restitusi psikis itu nilainya tidak terbatas. Sampai sekarang kami masih sering murung dan merasa berdosa. Psikis kami sebagai orang tua betul-betul terkoyak," ucapnya lirih.

Selain berkoordinasi untuk pendampingan hukum dengan bidang hukum dari Kamar Dagang (Kadin) Yogyakarta dan tim hukum MY Esti Wijayanti, perwakilan orang tua juga berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta arahan terkait restitusi yang akan mengkuiliasi kerugian secara kolektif.

Melalui kuasa hukum, data-data biaya pendidikan, kuitansi pengobatan termasuk kerugian dari total 106 wali murid akan ditampulkan sebagai bukti pendukung. "Saat ini yang sudah mengajukan restitusi ada 106 (orang tua)," katanya.

"Ada kemungkinan nanti beberapa wali murid yang lain juga akan bertambah. Sekarang kami betul-betul masih merasakan sakit sekali. Sebagai orang tua kami merasa bersalah, kami merasa berdosa terhadap anak kami," lanjutnya.

Sebelumnya, orang tua

anak korban Little Aresha lainnya berinisiatif AF mengemukakan bahwa para orang tua telah berupaya melakukan seleksi sebelum memilih daycare. Kesan awal yang diterima pun cukup meyakinkan. Pengasuh terlihat agamis, setiap kali orang tua mengantar anak selalu diterima dengan baik. Setiap pertanyaan dan komplain pun bisa dijawab dengan rasional.

Maka dari itu, AF meminta masyarakat tidak menyalahkan para wali murid. Pasalnya setiap orang tua pun pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. "Wali murid bukan orang-orang bodoh. Kami mohon jangan dijudge, tapi didukung," tegasnya.

**Pendamping psikologis**  
Wakil Ketua LPSK Perwakilan Yogyakarta, Sri Suparyati, mengatakan beberapa bentuk perlindungan hukum yang terencana untuk saat ini adalah penemuan pendamping psikologis bagi korban baik anak maupun orang tuanya.

Dugaan adanya kondisi anak kurang gizi atau stunting juga disampaikan para orang tua kepada pihak LPSK. Atas hal ini, Sri Suparyati memandang perlu adanya intervensi proaktif terhadap ahli gizi untuk mengidentifikasi hal itu.

Pihak LPSK akan membantu berkomunikasi dengan aparat penegak hukum supaya hak restitusi para korban ini dapat dipenuhi. "Ini hak yang seharusnya melekat pada korban, dalam hal ini diwakili oleh keluarga," katanya.

"Sehingga ini yang sebenarnya ke depan juga harus dikomunikasikan kepada pihak aparat penegak hukum berkaitan dengan hak restitusi yang menjadi haknya keluarga korban," ungkap Sri Suparyati.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogya, Lidya Ariani membenarkan bahwa hasil asesmen awal menunjukkan dampak psikologis yang cukup berat. Tidak hanya dialami oleh anak-anak, tetapi juga para orang tua korban.

"Mereka merasa sangat bersalah dan menyesal," ujarnya, Selasa (28/4). Menurut Ariani, rasa bersalah tersebut muncul karena sebagian besar orang tua sebenarnya sudah menangkap sinyal atau tanda-tanda perubahan perilaku pada anak mereka, seperti keengganan untuk berangkat ke daycare.

Namun, orang tua menganggap hal tersebut sebagai perilaku wajar pada anak-anak, sehingga mereka tetap membayangi buah hatinya ke lembaga yang ternyata tak bertinju.

Untuk menanganai hal ini, UPT PPA memberikan pendampingan psikologis awal agar para orang tua memiliki kekuatan mental untuk mengawal proses pemulihan anak-anak mereka. "Kita berikan dukungan supaya orang tuanya kuat dulu, sehingga nanti bisa maksimal mendampingi anaknya," terangnya.

Selain aspek psikologis, UPT PPA Kota Yogyakarta mulai melakukan skrining tumbuh kembang terhadap anak-anak korban Little Aresha dengan Dinas Kesehatan beserta Puskesmas setempat untuk melakukan pengecekan medis dan fisik secara menyeluruh.

**Dialihkan**  
Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta mulai mengalihkan anak-anak korban Daycare Little Aresha ke sejumlah tempat penitipan lain yang memenuhi standar. Hal ini untuk memastikan anak-anak tetap mendapat pengasuhan yang layak, aman, dan terpantau.

Wali Kota Hasto Wardoyo melakukan tinjauan langsung ke salah satu daycare pengganti, yakni Yayasan Pelang Anak Negeri di kawasan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Rabu (29/4).

"Kami mencari daycare daycare lain yang amanah, standar, baik, dan berizin tentunya. Hari ini kami mengecek langsung untuk meyakinkan bahwa fasilitasnya memadai," ujarnya.

Dalam tinjauan tersebut, Hasto mengapresiasi fasilitas yang tersedia, mulai dari keberadaan CCTV di setiap ruangan, kondisi ruangan ber-AC yang tidak lembab, hingga rasio pengasuh yang seimbang dengan jumlah anak.

Sudah ada tujuh anak dari Little Aresha yang resmi pindah ke Yayasan Pelang Anak Negeri. Pemkot Yogyakarta sendiri telah menyiapkan total 15 daycare rekanan yang tersebar di sekitar wilayah Umbulharjo untuk menampung total 103 anak eks Little Aresha. Hasto menjamin kapasitas tersebut mencukupi.

"Biaya kami tanggung sampai tiga bulan ke depan. Kami siapkan anggarannya agar orang tua yang sedang mengalami tekanan psikis bisa sedikit terbebas dari beban biaya," imbuhnya.

Hasto juga menyadari bahwa para orang tua juga mengalami trauma dan tekanan mental yang hebat akibat kejadian nan memluakkan ini. Ia merasakan betul, stres dan rasa terkejut yang begitu mendalam menyelimuti para orang tua.

"Orang tua juga mengalami gangguan karena stres, kondisi seperti ini sangat mengejutkan. Kemarin pun mereka menangsang saat me-

nyampaikan keluh kesahnya," jelasnya.

Pemina Yayasan Pelang Anak Negeri, Sri Utami Purwaningsih membenarkan bahwa tujuh anak dialihkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ke yayasan-yayasan. "Saya miris dan rasanya ingin menangsang. Begitu banyak cerita duka dari para orang tua yang disampaikan kepada kami. Secara manusiawi dan sebagai pendidik, kami sangat prihatin dengan kejadian ini," ujarnya, Rabu (29/4).

Tami menceritakan, salah satu momen memluakkan adalah saat tiga anak yang ditanganinya sampai enggan mengizinkan kakak ke dalam gedung yayasan. Bocah tersebut menunjukkan reaksi ketakutan yang hebat ketika melihat ruangan yang sedikit redup akibat perliakuan yang diterima korban selama di Little Aresha Daycare.

Berdasarkan kesaksian yang dihipungannya, diduga anak-anak tersebut sering ditempatkan di sebuah ruang gelap sebagai bentuk hukuman atau penalaran. "Kemarin baru mau di bawa ke kamar mandi saja langsung bilang takut gelap. Traumatiknya sangat amat tertanam," jelasnya.

Mengingat kondisi psikis yang cenderung belum stabil, Yayasan Pelang Anak Negeri menerapkan standar pendampingan ekstra di banding siswa lain. Khusus untuk anak-anak eks Little Aresha Daycare rasio pendampingan yang tidak biasa.

"Karena mereka baru saja melepaskan diri dan butuh merasa bebas, kami harus ekstra. Saat ini, satu anak kami handle dengan dua orang guru pendamping," tegasnya.

**Pasal berlapis**  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti berharap proses hukum terhadap para pengelola Daycare Little Aresha dapat berjalan serius dan menjadi prioritas aparat penegak hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Politisi FDI Perjuangan ini juga menyinggung kemungkinan penerapan pasal berlapis untuk menjerat para pengelola. Pasalnya, tindakan yang dilakukan pengelola sudah melampaui batas kemanusiaan.

"Kami berharap proses penanganan hukum akan berjalan serius, termasuk kemungkinan pasal berlapis, bahwa itu bukan hanya kekerasan terhadap anak tapi juga menyangkut beberapa hal yang mungkin sudah ada perencanaan awal dan pengingkaran janji," katanya, Rabu (29/4). (hda/aka/mto/rlf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 17 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005